

**EVALUASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM)
PEDULI UMMAT DALAM KEGIATAN ADAPTASI
PENGENDALIAN BANJIR DI KELURAHAN MUGIREJO,
KOTA SAMARINDA**

Alya Septia Nur, Santi Rande

**eJournal Administrasi Publik
Volume 14, Nomor 1, 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Evaluasi Program Kampung Iklim (ProKlim) Peduli Ummat Dalam Kegiatan Adaptasi Pengendalian Banjir di Kelurahan Mugirejo, Kota Samarinda.

Pengarang : Alya Septia Nur

NIM : 2202016090

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 18 Mei 2026

Pembimbing,



**Dr. Santi Rande, M.Si.
NIP 19751001 200604 2 001**

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
----------------------	---------------------------------------

Volume	: 14
---------------	-------------

Nomor	: 1
--------------	------------

Tahun	: 2026
--------------	---------------

Halaman	: 15-26
----------------	----------------

EVALUASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) PEDULI UMMAT DALAM KEGIATAN ADAPTASI PENGENDALIAN BANJIR DI KELURAHAN MUGIREJO, KOTA SAMARINDA

Alya Septia Nur ¹, Santi Rande ²

Abstrak

Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan kegiatan berbasis masyarakat untuk mendukung adaptasi perubahan iklim, termasuk pengendalian banjir pada tingkat lokal. Kelurahan Mugirejo, Kota Samarinda, menjadi salah satu wilayah yang mengimplementasikan ProKlim dengan nama ProKlim Peduli Ummat sebagai upaya pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model evaluasi program Bridgman dan Davis yang meliputi indikator input, process, output, dan outcomes. Data diperoleh dengan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ProKlim Peduli Ummat di Kelurahan Mugirejo telah berjalan sesuai dengan ketentuan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya sebagai program adaptasi pengendalian banjir berbasis masyarakat. Keberhasilan program memang terlihat dari adanya legalitas kelembagaan, pelaksanaan gotong royong, normalisasi drainase, penghijauan, pengelolaan sampah, serta pemanfaatan lahan bekas tambang, penghargaan ProKlim kategori “Utama”, serta meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Namun, pelaksanaan program ini belum berjalan secara optimal, khususnya pada indikator process dan outcomes, karena program belum dilakukan secara terjadwal, koordinasi lintas OPD belum sepenuhnya terintegrasi, bantuan dana yang diberikan hanya di awal program, serta partisipasi masyarakat belum merata dalam mendukung keberlanjutan program. Selain itu faktor eksternal seperti curah hujan tinggi, sedimentasi drainase, kondisi lahan pasca tambang, dan pembangunan wilayah turut memengaruhi efektivitas pengendalian banjir. Dengan demikian, ProKlim Peduli Ummat perlu diperkuat melalui pendanaan berkelanjutan, pembinaan masyarakat, monitoring yang terukur, dan koordinasi lintas sektor, agar pelaksanaannya lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Evaluasi Progra, ProKlim, Adaptasi Perubahan Iklim, Pengendalian Banjir, Partisipasi Masyarakat

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: septianuralya373@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Perubahan iklim menjadi tantangan global yang berdampak pada meningkatnya bencana hidrometeorologi, salah satunya banjir. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim yang ditandai dengan perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu, serta meningkatnya risiko banjir yang berdampak pada lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kondisi menuntut adanya kebijakan adaptasi yang melibatkan masyarakat secara langsung di tingkat lokal. Sebagai bentuk respons dari pemerintah, terbentuklah Program Kampung Iklim (ProKlim) melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2012 dan juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016. Program ini bertujuan untuk mengajak masyarakat melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui kegiatan seperti pengendalian banjir, konservasi air, penghijauan, pengelolaan sampah, serta penguatan kelembagaan masyarakat tingkat lokal. ProKlim juga mendukung capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ke-13 tentang penanganan perubahan iklim.

Kota Samarinda, merupakan salah satu Kota di Kalimantan Timur yang aktif melaksanakan ProKlim. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda pada tahun 2024, terdapat catatan 15 lokasi ProKlim yang terdaftar oleh Sistem Registri Nasional (SRN), Berdasarkan evaluasi DLH Kota Samarinda, dari 15 lokasi yang terdaftar aktif, hanya beberapa wilayah yang masih menjalankan kegiatan adaptasi lingkungan secara berkelanjutan, seperti Kelurahan Gunung Lingai dan Sindang Sari. Sementara itu, Kelurahan Mugirejo yang pernah memperoleh Sertifikat Utama dan Trophy ProKlim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2021, sudah tidak lagi tercatat sebagai lokasi aktif pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara administratif Mugirejo pernah dinilai berhasil, pelaksanaan program di lapangan justru mengalami penurunan dan keberlanjutannya belum berjalan optimal.

No	Lokasi ProKlim (Kelurahan)	Tahun	Kategori ProKlim
1	ProKlim Guling Bersatu, Kel. Gunung Lingai, Kec. Sungai Kunjang	2024	Sertifikat Utama
2	ProKlim Kelurahan Sindang Sari, Kec. Sambutan	2022	Sertifikat Lestari dan Trophy
3	ProKlim Ramah, Kel. Rawa Makmur, Kec. Palaran	2022	Sertifikat Utama
4	ProKlim Pemuda Peduli Lingkungan, Kel. Gunung Lingai	2021	Madya
5	ProKlim Bank Ramli CESERI, Kel. Karang Anyar	2021	Madya
6	ProKlim Bank Ramli SALIM, Kel. Air Putih	2021	Madya
7	ProKlim Bank Ramli SYLVA Lestari, Kel. Karang Asam Ulu	2021	Madya
8	ProKlim Bank Ramli, Kel. Karang Asam Ilir	2021	Madya
9	ProKlim Kampung Tangguh Nusantara, Kel.	2021	Madya

Evaluasi Program Kampung Iklim (ProKlim) Peduli Ummat Dalam Kegiatan Adaptasi Pengendalian Banjir di Kelurahan Mugirejo, Kota Samarinda (Nur dan Rande)

10	Loa Bakung ProKlim Kampung KB Bandara Berseri, Kel. Bandara	2021	Madya
11	ProKlim Peduli Ummat, Kel. Mugirejo, Kec. Sungai Pinang	2021	Sertifikat Utama dan Trophy
12	ProKlim Kel. Pulau Atas, Kec. Sambutan	2020	Sertifikat Utama
13	ProKlim Kel. Sambutan, Kec. Sambutan	2020	Sertifikat Utama dan Trophy
14	ProKlim Kel. Makroman, Kec. Sambutan	2019	Sertifikat Utama
15	ProKlim Kel. Sindang Sari, Kec. Sambutan	2019	Sertifikat Utama dan Trophy

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, 2024

Secara geografis, Kelurahan Mugirejo merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap banjir karena dilalui oleh Sub-Daerah Aliran Sungai (Sub-DAS) Karang Mumus. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda, selama periode 2021–2025 banjir terjadi secara berulang dengan intensitas yang cukup tinggi. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh meluapnya aliran Sub-DAS Karang Mumus, sedimentasi sungai, serta tersumbatnya saluran drainase akibat sampah rumah tangga, sehingga meningkatkan risiko genangan di kawasan permukiman padat penduduk.

Tahun	Jumlah Kejadian Banjir	Ketinggian Air (cm)
2021	5 kali	40-80 cm
2022	1 kali	30-50 cm
2023	2 kali	60-160 cm
2024	1 kali	20-60 cm
2025 (Jan-Sept)	3 kali	10-50 cm

Sumber: BPBD Kota Samarinda, 2025

Gambar 1 Tambang Ilegal di Kelurahan Mugirejo

Banjir Rendam Mugirejo di Samarinda Imbas Aktivitas Tambang Ilegal

© 21 Desember 2023



Lokasi penambangan di kawasan Perumahan Talang Sari Regency saat ditinjau Wali Kota Andi Harun, Rabu 20 Desember 2023 (niaga.asia/Annisa Dwi Putri)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Bencana banjir yang menerjang permukiman warga di Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Samarinda Utara, Sabtu 16 Desember 2023 lalu, terbukti imbas dari kegiatan ilegal tambang batu bara.

Sumber: Niaga Asia, 2023

Berdasarkan gambar 1 di atas dapat diketahui bahwa aktivitas pertambangan di wilayah hulu Sungai Karang Mumus cukup berpotensi untuk memperparah risiko banjir di wilayah hilir, termasuk Kelurahan Mugirejo. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan banjir tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam, tetapi juga oleh aktivitas manusia yang berdampak pada perubahan kondisi lingkungan.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap ProKlim Peduli Ummat sebagai bentuk adaptasi dari masyarakat Mugirejo. Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan program, faktor pendukung dan penghambatnya, serta memberikan rekomendasi dalam memperkuat keberlanjutan ProKlim sebagai upaya pengendalian banjir berbasis masyarakat di wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan publik, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *public policy*, secara konseptual merujuk pada prinsip dan standar yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan. Menurut *Black's Law Dictionary* karya Henry Campbell Black (dalam Suaib dkk., 2016), kebijakan publik diartikan sebagai “*principles and standards regarded by the legislature or by the courts as being of fundamental concern to the state and the whole of society,*” yang bermakna bahwa kebijakan publik mencakup seperangkat prinsip dan norma yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun yudikatif sebagai hal yang bersifat mendasar bagi kepentingan negara dan masyarakat secara keseluruhan. William N. Dunn (2017) juga mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang mengandung banyak nilai-nilai dan diambil dalam konteks politik guna mencapai tujuan tertentu yang diinginkan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Kebijakan publik dalam konteks adaptasi perubahan iklim memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pemerintah untuk melibatkan masyarakat secara aktif. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri LHK Nomor 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim, yang menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Dengan demikian, kebijakan lingkungan tidak bersifat *top-down* semata, tetapi juga menjadi sarana demokratisasi melalui kolaborasi antara negara dan masyarakat. Melalui perspektif teori kebijakan publik, dapat dilihat bagaimana menilai kebijakan nasional seperti ProKlim diolah dan diterjemahkan menjadi praktik nyata di tingkat lokal.

Evaluasi Program

Evaluasi program merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi terkait pelaksanaan serta hasil suatu program. Tujuannya adalah menilai relevansi, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program sehingga dapat diketahui sejauh mana program tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Yati dkk., (2021) dalam konteks kebijakan publik, evaluasi program menjadi instrumen penting bagi pengambil keputusan untuk menilai manfaat nyata dari pelaksanaan suatu program.

Menurut Wholey dkk. (2015), evaluasi program memiliki dua fungsi utama, yaitu akuntabilitas dan pembelajaran. Fungsi akuntabilitas bertujuan memastikan penggunaan sumber daya publik dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan efisien, sedangkan fungsi pembelajaran digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas program, mengembangkan inovasi, dan memperbaiki kelemahan yang ada. Evaluasi dapat dilakukan selama program berlangsung (*formative evaluation*) maupun setelah program selesai (*summative evaluation*), sehingga hasilnya tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga landasan dalam perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Model Evaluasi Program Bridgman dan Davis

Bridgman dan Davis (dalam Nugroho, 2022) menjelaskan bahwa evaluasi program perlu menggunakan seperangkat indikator atau kriteria yang mampu menilai efektivitas pelaksanaan program secara menyeluruh, indikator tersebut mencakup empat komponen utama, yaitu sebagai berikut.

1. *Input*, merupakan segala sumber daya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program. *Input* meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta dukungan kelembagaan. Ketersediaan indikator yang memadai menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu program karena menjadi dasar awal pelaksanaan kegiatan.
2. *Process*, merupakan tahapan pelaksanaan program yang menunjukkan bagaimana kegiatan dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi proses berfokus pada mekanisme pelaksanaan, koordinasi antaraktor, partisipasi masyarakat, dan monitoring program.
3. *Output*, merupakan hasil yang langsung diperoleh setelah program dilaksanakan. *Output* biasanya bersifat nyata dan dapat diukur dalam jangka pendek, seperti kegiatan yang terlaksana, fasilitas yang tersedia, maupun perubahan fisik lingkungan.
4. *Outcomes*, merupakan dampak atau perubahan yang terjadi setelah program berjalan dalam jangka waktu tertentu. *Outcomes* lebih menekankan pada manfaat program terhadap masyarakat, perubahan perilaku, peningkatan kapasitas adaptasi, serta keberlanjutan program.

Melalui empat indikator tersebut, evaluasi ProKlim Peduli Ummat dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan program serta faktor pendukung dan penghambatnya, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi yang tepat untuk memperkuat keberlanjutan program di masa mendatang.

Pengendalian Banjir

Pengendalian banjir merupakan bagian dari manajemen risiko bencana yang bertujuan untuk mengurangi kerugian bagi masyarakat dan lingkungan akibat luapan air. Secara umum, pengendalian banjir dilakukan melalui dua pendekatan

utama yaitu struktural yang berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik seperti bendungan dan sistem drainase untuk menahan serta mengatur debit air agar tidak meluap. Sedangkan pendekatan non struktural menekankan pada upaya preventif dan berkelanjutan, seperti pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), sistem peringatan dini, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi banjir (Hidayat, 2022). Pendekatan ini dinilai lebih berkelanjutan karena tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan partisipasi masyarakat dan pengelolaan lingkungan secara jangka panjang.

Program Kampung Iklim (ProKlim)

Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan program prioritas nasional yang diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak tahun 2012 untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim melalui kegiatan adaptasi dan mitigasi berbasis komunitas. Program ini menggunakan pendekatan *Community-Based Adaptation* (CBA), yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, seperti melalui penghijauan, konservasi air, pengelolaan sampah berbasis 3R, penggunaan energi ramah lingkungan, serta pertanian rendah emisi (Ariyaningsih & Shaw, 2023). Dengan menggabungkan upaya adaptasi dan mitigasi, ProKlim bertujuan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap risiko perubahan iklim sekaligus mendukung pencapaian *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia dalam kerangka Perjanjian Paris 2015.

Peraturan Menteri LHK No. P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 menjadi dasar hukum pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat. Regulasi ini bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengendalian perubahan iklim melalui aksi nyata, seperti pengelolaan lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta peningkatan kapasitas adaptif terhadap bencana iklim. Indikator penilaiannya mencakup aspek mitigasi, adaptasi, dan penguatan kelembagaan masyarakat, serta disertai mekanisme penghargaan seperti ProKlim Pratama hingga Lestari untuk mendorong keberlanjutan program.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi Program Kampung Iklim (ProKlim) Peduli Ummat dalam kegiatan adaptasi pengendalian banjir di Kelurahan Miugirejo, Kota Samarinda. Fokus penelitian menggunakan model evaluasi Bridgman dan Davis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta data sekunder dari Dinas Lingkungan Hidup, Kelurahan Mugirejo, dan Kelompok ProKlim di Kelurahan Mugirejo. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Evaluasi Program Kampung Iklim (ProKlim) Peduli Ummat dalam Kegiatan Adaptasi Pengendalian Banjir di Kelurahan Mugirejo, Kota Samarinda Menurut Bridgman dan Davis

1. Input

Indikator ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ProKlim Peduli Ummat di Kelurahan Mugirejo telah memiliki dasar awal yang cukup baik melalui dukungan kelembagaan, sumber daya fisik, sumber daya manusia, serta pembinaan dari pemerintah. Hal ini terlihat adanya Surat Keputusan (SK) Kelompok ProKlim Peduli Ummat pada tahun 2021 yang menjadi dasar legalitas program, lengkap dengan struktur keanggotaannya. Selain itu masyarakat juga mulai terlibat dalam kegiatan seperti gotong royong, penghijauan, perbaikan drainase dan pengelolaan lingkungan sebagai bentuk adaptasi terhadap banjir dan kerusakan lingkungan.

Namun hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami ProKlim sebagai program formal karena sosialisasi lebih berfokus pada kegiatan fisik daripada pemahaman konsep program secara menyeluruh. Dari sisi sarana, bantuan seperti bibit tanaman, tandon air hujan, dan instalasi hidroponik hanya bersifat stimulan, sementara kebutuhan utama seperti perbaikan drainase, alat berat, dan dukungan teknis masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan lapangan dengan dukungan program, sehingga keberlanjutan ProKlim masih sangat bergantung pada swadaya masyarakat dan dukungan pemerintah.

2. Process

Pada indikator *process* menunjukkan bahwa pelaksanaan ProKlim Peduli Ummat di Kelurahan Mugirejo berjalan melalui kegiatan gotong royong, koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah kelurahan, serta dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembersihan dan normalisasi drainase, penghijauan, pengelolaan sampah, serta perawatan lingkungan sebagai upaya adaptasi terhadap banjir. Proses ini menunjukkan bahwa implementasi program tidak berjalan secara individual, melainkan melalui kolaborasi antaraktor, di mana masyarakat berperan aktif karena merasakan langsung dampak banjir, sedimentasi drainase, dan kerusakan lingkungan di wilayahnya.

Namun, pelaksanaan indikator *process* belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala pada koordinasi lintas sektor dan monitoring program. Pembagian kewenangan antarinstansi seperti DLH, PUPR, Dinas Pertanian, dan kelurahan belum terintegrasi secara maksimal sehingga pelaksanaan kegiatan masih cenderung berjalan sektoral. Selain itu, monitoring program masih lebih banyak dilakukan secara administratif melalui dokumentasi kegiatan dan laporan pelaksanaan, sementara evaluasi berkala yang terjadwal belum berjalan efektif.

Kondisi ini menyebabkan keberhasilan program sulit diukur secara objektif, terutama dalam menilai sejauh mana kegiatan adaptasi benar-benar berkontribusi terhadap pengurangan risiko banjir di Kelurahan Mugirejo.

3. Output

Pada indikator *output*, capaian fisik terlihat dari perbaikan dan pembersihan drainase, penghijauan pada lahan bekas tambang, pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian, serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Secara administratif, program ini berhasil memperoleh penghargaan ProKlim kategori “Utama” yang menunjukkan adanya pengakuan formal dari pemerintah. Selain itu, capaian sosial juga terlihat dari meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap keberishan lingkungan, meskipun perubahan tersebut belum merata pada seluruh warga. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian *output* belum sepenuhnya optimal karena banjir masih tetap terjadi saat curah hujan tinggi dan beberapa hasil program masih bergantung pada dukungan eksternal serta partisipasi masyarakat yang belum merata. Kondisi ini disebabkan karena permasalahan banjir di Mugirejo tidak hanya dipengaruhi oleh drainase lokal, tetapi juga oleh faktor geografis, sedimentasi, lahan bekas tambang, dan curah hujan yang tinggi. Dengan demikian, output ProKlim lebih tepat dipahami sebagai upaya awal dalam mengurangi risiko banjir, bukan sebagai solusi menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan monitoring, pengukuran hasil program, dan keberlanjutan partisipasi masyarakat agar capaian program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

4. Outcomes

pada indikator *outcomes* menunjukkan bahwa Program Kampung Iklim (ProKlim) Peduli Ummat di Kelurahan Mugirejo telah memberikan dampak lanjutan berupa perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, pemeliharaan saluran drainase, serta meningkatnya kepedulian terhadap penghijauan dan pemulihan lahan bekas tambang. Selain itu, terdapat indikasi berkurangnya genangan banjir di beberapa titik, meskipun penurunannya belum dapat diukur secara signifikan melalui data kuantitatif. Hal ini menunjukkan bahwa ProKlim telah memberikan dampak awal yang positif, terutama dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir.

Namun, capaian *outcomes* belum sepenuhnya optimal karena perubahan perilaku belum merata pada seluruh masyarakat di Kelurahan Mugirejo dan persoalan banjir masih tetap terjadi akibat faktor eksternal seperti sedimentasi, curah hujan tinggi, kondisi lahan bekas tambang, serta alih fungsi lahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian banjir di Mugirejo tidak dapat diselesaikan hanya melalui aksi komunitas, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan lintas sektor, penguatan kelembagaan, serta monitoring dampak yang lebih terukur. Dengan demikian, ProKlim telah memberikan arah perubahan yang positif, tetapi

keberlanjutannya masih membutuhkan dukungan yang lebih kuat agar dampaknya lebih optimal dan berkelanjutan.

Faktor Pendukung dan Penghambat ProKlim Peduli Ummat

Faktor Pendukung

Faktor pendukung pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) Peduli Ummat di Kelurahan Mugirejo berasal dari adanya legalitas kelembagaan, kepemimpinan lokal yang aktif, partisipasi masyarakat, budaya gotong royong, dukungan lintas sektor, serta kesadaran kolektif masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Keberadaan Surat Keputusan (SK) pembentukan kelompok ProKlim dan struktur organisasi yang jelas menjadi dasar formal pelaksanaan program, sementara ketua kelompok dan pengurus RT berperan aktif dalam menggerakkan kegiatan seperti pembersihan drainase, penghijauan, pengelolaan sampah, dan gotong royong lingkungan. Selain itu, masyarakat juga terlibat langsung karena merasakan dampak banjir dan kerusakan lingkungan, sehingga muncul kepedulian untuk menjaga wilayah tempat tinggal mereka.

Dukungan dari berbagai instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, PUPR, dan pihak eksternal lainnya juga menjadi faktor penting dalam memperkuat pelaksanaan program melalui bantuan bibit, pendampingan, dan dukungan teknis. Kondisi Mugirejo sebagai wilayah bekas tambang dan rawan banjir justru mendorong munculnya kesadaran kolektif masyarakat untuk melakukan penghijauan, perbaikan drainase, dan pemulihan lahan kritis. Namun, faktor pendukung tersebut masih lebih kuat pada tahap awal pelaksanaan dan belum sepenuhnya menjamin kemandirian program jangka panjang karena beberapa kegiatan masih bergantung pada bantuan pemerintah, peran tokoh lokal, dan dukungan lintas sektor yang perlu terus dipertahankan.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) Peduli Ummat terletak pada keterbatasan pendanaan, monitoring dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal, faktor eksternal lingkungan, serta partisipasi masyarakat yang belum merata. Pendanaan program masih bersifat terbatas dan belum memiliki alokasi anggaran khusus yang berkelanjutan, sehingga banyak kegiatan seperti normalisasi drainase, pengangkatan sedimentasi, penghijauan, dan pemulihan lahan bekas tambang masih bergantung pada bantuan stimulan pemerintah dan swadaya masyarakat. Selain itu, monitoring antarinstansi seperti DLH, PUPR, Dinas Pertanian, dan kelurahan belum terintegrasi secara maksimal, sehingga pengawasan dan evaluasi program masih lebih banyak bersifat administratif daripada pengukuran capaian yang terstruktur.

Hambatan lainnya berasal dari kondisi eksternal seperti lahan pasca tambang, pembangunan kawasan baru, dan tingginya risiko banjir yang berada di luar kendali langsung kelompok ProKlim. Kondisi ini membuat kegiatan berbasis komunitas seperti penghijauan dan pembersihan drainase belum cukup untuk

menyelesaikan persoalan banjir secara menyeluruh. Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga belum merata karena tidak semua warga memiliki pemahaman dan komitmen yang sama terhadap ProKlim, sebagian masih menganggap bahwa ini kegiatan kerja bakti biasa. Hal ini menyebabkan keberlanjutan program masih bergantung pada kelompok masyarakat tertentu. Dengan demikian, meskipun ProKlim telah berjalan dan menghasilkan capaian, program masih memerlukan penguatan pada aspek pendanaan, koordinasi kelembagaan, dan pemerataan partisipasi agar dampaknya lebih optimal dan berkelanjutan.

Penutup

Kesimpulan

Evaluasi Program Kampung Iklim (ProKlim) Peduli Ummat dalam kegiatan adaptasi pengendalian banjir di Kelurahan Mugirejo telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal dilihat dari beberapa indikator berikut:

1. *Input*, program telah didukung oleh legalitas kelembagaan melalui pembentukan Kelompok ProKlim, bantuan sarana prasarana seperti bibit tanaman, tempat sampah terpilah, tandon air hujan, serta pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda. Kelurahan Mugirejo juga memperoleh penghargaan ProKlim kategori “Utama”. Namun, keterbatasan pendanaan dan belum meratanya pemahaman masyarakat masih menjadi kendala.
2. *Process*, pelaksanaan program dilakukan melalui gotong royong, normalisasi drainase, penghijauan, pengelolaan sampah, dan pemanfaatan lahan bekas tambang. Koordinasi antara kelurahan, RT, masyarakat, dan OPD sudah berjalan, tetapi belum maksimal. Monitoring dan evaluasi juga belum dilakukan secara rutin sehingga beberapa kegiatan belum berkelanjutan.
3. *Output*, hasil program terlihat dari perbaikan drainase, penghijauan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pemanfaatan lahan, serta penghargaan ProKlim yang diperoleh. Selain itu, kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan juga meningkat. Namun, banjir masih tetap terjadi dan beberapa kegiatan mengalami penurunan.
4. *Outcomes*, program memberikan dampak positif berupa meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, merawat drainase, dan mengurangi risiko banjir. Terdapat indikasi berkurangnya genangan di beberapa titik, tetapi belum signifikan karena masih dipengaruhi faktor eksternal seperti curah hujan tinggi, sedimentasi, dan kondisi lahan pasca tambang.

Faktor pendukung program meliputi legalitas kelembagaan, kepemimpinan lokal, partisipasi masyarakat, budaya gotong royong, dukungan lintas sektor, dan kesadaran warga terhadap lingkungan. Sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan pendanaan, lemahnya monitoring dan koordinasi lintas OPD, partisipasi masyarakat yang belum merata, serta faktor eksternal seperti sedimentasi drainase, curah hujan tinggi, dan kondisi lahan bekas tambang.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan mengenai Evaluasi Program Kampung Iklim (ProKlim) Peduli Ummat dalam Kegiatan Adaptasi Pengendalian Banjir di Kelurahan Mugirejo Kota Samarinda, maka dapat dikemukakan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Daerah, disarankan untuk meningkatkan dukungan pendanaan yang lebih berkelanjutan serta memperkuat koordinasi dan monitoring lintas OPD agar pelaksanaan ProKlim lebih terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah, pengendalian banjir, dan tata ruang wilayah. Selain itu, diperlukan evaluasi berkala berbasis indikator yang terukur agar dampak program dapat dinilai secara lebih objektif dan berkelanjutan.
2. Bagi Pemerintah Kelurahan dan Pengurus ProKlim, perlu meningkatkan sosialisasi program secara merata kepada seluruh masyarakat serta mendorong partisipasi warga secara lebih inklusif dalam kegiatan penghijauan, pengelolaan sampah, pembersihan drainase, dan adaptasi lingkungan lainnya. Pengembangan inovasi berbasis lingkungan yang memiliki nilai ekonomi, seperti bank sampah dan pemanfaatan lahan hijau produktif, juga dapat dilakukan guna memperkuat keberlanjutan program.
3. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat terus menjaga komitmen, kesadaran, dan kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan sehingga Program Kampung Iklim tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi dapat menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan dalam upaya pengendalian banjir dan peningkatan ketahanan lingkungan di Kelurahan Mugirejo.

Daftar Pustaka

- Ariyaningsih, & Shaw, R. (2023). Community-based approach for climate resilience and COVID-19: Case study of a Climate Village (Kampung Iklim) in Balikpapan, Indonesia. *Land*, 12(3). <https://doi.org/10.3390/land12030650>
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda. (2025). *Data statistik kejadian banjir di Kelurahan Mugirejo 2021–2025*.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. (2024). *Data lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kota Samarinda tahun 2019–2024*. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
- Dunn, W. N. (2017). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315181226>
- Hidayat, Y. (2022). Menakar solusi kebijakan pengendalian banjir di Indonesia. *Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika*, 4(4), 398–403. <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.v4.i4.11>
- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri*

- Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim.*
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (ProKlim).*
- Niaga.Asia. (2023, November 15). Banjir di Mugirejo akibat aktivitas tambang dan luapan sungai. <https://www.niaga.asia/banjir-rendam-mugirejo-di-samarinda-imbis-aktivitas-tambang-ilegal/>
- Nugroho, R. (2020). *Public policy 6* (Edisi revisi). Elex Media Komputindo.
- Suaib, M. R. (2016). *Pengantar kebijakan publik.*
- Wholey, J. S., Hatry, H. P., & Newcomer, K. E. (2015). *Handbook of practical program evaluation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Yati, I., et al. (2021). Evaluasi pelaksanaan kebijakan program penyediaan air. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), 83–96.